

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dapat dimulai dari usia dini karena dapat membangun perkembangan pribadi anak dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia, melalui pendidikan kecerdasan dan ketrampilan semakin diasah untuk dapat menghadapi dinamika kehidupan yang semakin kompleks, dalam skala luas, pendidikan merupakan indikator kualitas sumber daya manusia. Semakin baik pendidikan maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka pemerintah memberikan hak kepada setiap warga Negara Indonesia untuk mendapat pendidikan yang dijamin oleh undang – undang dasar (UUD 45)

Dalam upaya untuk menciptakan pendidikan yang memadai di sekolah nonformal pemerintah mempunyai peraturan mengenai pendidikan salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 137 tahun 2014 pasal 37 menetapkan standar nasional pendidikan Anak Usia Dini meliputi : standart tingkat pencapaian perkembangan anak, standard isi, standard proses, standard kompetensi Penilaian, standard pendidik dan tenaga kependidikan, standard sarana dan prasarana, standard pengelolaan, standard pembiayaan. Beberapa indikator sebagai penentuan kualitas mutu sekolah sebagai input antara lain : siswa, kurikulum, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan

lingkungan. Biaya pendidikan menjadi salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kualitas mutu sekolah, salah satu masalah yang muncul pada dunia pendidikan yaitu masyarakat masih beranggapan biaya pendidikan yang mahal. Masyarakat mengharapkan pendidikan yang bermutu, akan tetapi merasa keberatan untuk mengeluarkan dana. Oleh karena itu, pemerintah membantu mengatasi masalah pendanaan sekolah melalui Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). BOP membantu dalam menutup biaya operasi sedangkan untuk biaya investasi harus ditanggung oleh sekolah. Untuk menutup kekurangan dana tersebut maka sekolah masih mengadakan pungutan kepada peserta didik.

Menurut Dadang Suhardan, Riduwan, & Enas (2012:22) Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kelancaran pendidikan. Biaya pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, dengan kata lain Biaya pendidikan merupakan suatu pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 137 tahun 2014 pasal 37 pembiayaan pendidikan terdiri dari 2 komponen : 1) biaya operasional yang dipergunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana - prasarana, pengembangan SDM; 2) biaya personal yang dipergunakan untuk

biaya pendidikan yang akan dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

Sumber dana untuk memenuhi biaya pendidikan berasal dari beberapa pihak. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu pendanaan pendidikan tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat melainkan partisipasi dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurut amanat undang – undang tersebut jelas bahwa dalam rangka meningkatkan layanan sekolah, perihal pendanaan difasilitasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, sejauh ini pendanaan yang diberikan oleh pemerintah melalui dana dekonsentrasi (dana bantuan operasional) pada PAUD, dan baru sebatas pada beberapa lembaga PAUD. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat menyatakan bahwa Berbagai program dana bantuan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, seperti Bantuan Rintisan Program, Bantuan Kelembagaan, Bantuan Kerja Sama, Bantuan Pusat Unggulan Program PAUD, dan Bantuan Rintisan Pos PAUD di Daerah Terpencil. Bantuan –bantuan tersebut dapat membantu lembaga – lembaga nonformal agar dapat meningkatkan kualitas lembaga tersebut.

Salah satu sumber dana dan pelaksanaan program Pendidikan non formal, pemerintah meluncurkan bantuan operasional pendidikan kepada Lembaga pendidikan Sekolah PAUD yaitu BOP PAUD, menurut antaranews.com bahwa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran dananya sebesar Rp 4,47 triliun untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik 10% dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp 4.07 triliun. Bantuan tersebut diberikan kepada 7.459.167 anak dengan nominal sebesar Rp 600 ribu per anak. BOP PAUD adalah program pemerintah untuk membantu biaya operasional. Sasaran dari program ini adalah lembaga PAUD yang terdaftar dalam data pokok PAUD dan pendidikan masyarakat (DAPODIK). Sebab itu dana yang dialokasikan oleh Pemerintah harus dapat diserap oleh Lembaga – Lembaga non formal agar dapat meningkatkan mutu Lembaga pendidikan non formal tersebut.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 Pasal 3 Menyatakan pemanfaatan dana BOP PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif dan efisien; dan sebagai pertanggung jawaban keuangan dana BOP PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan. Sebab itu dana yang diterima oleh Lembaga PAUD harus dilaporkan secara transparan dan bukti – bukti transaksi dijadikan sebagai laporan pertanggung jawaban tentang BOP PAUD.

Menurut Nanang Fattah (2001) dalam hal pembiayaan pendidikan bahwa biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah dan

proses belajar mengajar serta kualitas *outcomes* yang dihasilkan, Sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang BOP PAUD yang digunakan untuk membantu kegiatan operasional pembelajaran namun tidak semua Lembaga PAUD di Surabaya mendapatkan bantuan tersebut. Adanya korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan disekolah. Oleh karena itu satuan pendidikan memerlukan perencanaan biaya pendidikan yang tepat antara sumber dana dan pengeluarannya. Dengan informasi perencanaan biaya pendidikan dapat diketahui akurasi di dalam penetapan biaya penyelenggaraan pendidikan, sebab itu akuntabilitas keuangan suatu Lembaga pendidikan menjadi sebuah tuntutan. Sekolah dapat mengkomunikasikan secara transparan dan terbatas atas biaya penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat dapat menilai sekaligus mengevaluasi kinerja keuangan sekolah tersebut.

Salah satu lembaga pendidikan yang menerima BOP PAUD di Surabaya TK Tunas Harapan Bangsa mencoba untuk memberikan kontribusi terbaik dalam hal pendidikan dengan adanya bantuan dari pemerintah dapat membantu dalam pembiayaan untuk kegiatan pendidikan. Oleh karena itu TK Tunas Harapan Bangsa perlu memperhitungkan dalam aspek biaya untuk kelancaran segala pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan sekolah supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan kelayakan dalam pendidikan sekolah. Upaya meningkatkan mutu pendidikpun menambah biaya yang akan dikeluarkan oleh sekolah seperti mengikuti seminar dan pelatihan – pelatihan guru, oleh karena itu TK Tunas Harapan Bangsa perlu

memperhitungkan efektifitas biaya per peserta didik (*unit cost*) termasuk biaya operasional dan biaya personal. Informasi biaya tersebut dapat digunakan sebagai ukuran apakah masukan yang dikorbankan memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah daripada nilai keluarannya atau sebaliknya. Perhitungan biaya pendidikan dapat memperlihatkan berapa biaya yang ditanggung oleh masing – masing

peserta didik, baik yang bersumber dari pemerintah sebagai bantuan operasioanal peserta didik maupun dari personal. Maka dari itu perlu diperhitungkan secara rinci dan transparan mengenai biaya pendidikan sebagai informasi untuk mengambil keputusan. Perhitungan yang transparan juga dapat menjelaskan kepada masyarakat berapa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk ikut membantu terlaksananya pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Perhitungan Biaya Satuan Pendidikan TK Tunas Harapan Bangsa di Surabaya”

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Sesuai dengan Rumusan masalah diatas, Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar biaya per peserta didik di TK Tunas Harapan Bangsa.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perhitungan biaya satuan peserta didik dan Menjadi sumbangan

pemikiran berupa pengetahuan, data atau informasi yang memadai mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)

- a. bagi kepala sekolah TK Tunas Harapan Bangsa supaya kegiatan dan manajemen sekolah dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama antara sekolah dan masyarakat.
- b. hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ukuran anggaran pendidikan yang dapat disiapkan oleh masing – masing orang tua dan menjadi sumber informasi yang transparan, bagi masyarakat.
- c. hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan masukan untuk menghitung biaya satuan pendidikan, bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Ruang lingkup studi lapangan merupakan batasan suatu masalah yang terkait agar dapat membantu memecahkan masalah dan tidak terjadi pembahasan terlalu luas. Maka penulis telah mengidentifikasi masalah di atas dan memberikan batasan pada permasalahan perhitungan biaya satuan pendidikan pada TK Tunas Harapan Bangsa Tahun 2018/2019.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Studi lapangan

Studi lapangan adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi.

A. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yang mana penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait terutama mengenai masalah dari objek penelitian yang yang dibahas.

Jenis – jenis wawancara ada dua yaitu : Wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis memilih melakukan wawancara tidak terstruktur, Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada kepala sekolah mengenai penyusunan RAPBS rencana anggaran belanja dan pendapatan sekolah yang berkaitan dengan perhitungan biaya satuan pendidikan.

B. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan terhadap data Dokumen yang dikaji adalah Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), rekapitulasi jumlah peserta didik tahun ajaran 2018/2019, profil sekolah dan berbagai dokumen yang dianggap relevan tahun ajaran tahun 2018/2019 TK Tunas Harapan Bangsa.

Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$S_b(s,t) = f(K(s,t) \text{ dan } M(s,t))$$

Keterangan:

S_b = biaya satuan pendidikan per peserta didik per tahun

K = jumlah seluruh pengeluaran

M = jumlah peserta didik

s = sekolah tertentu

t = tahun tertentu

(Nanang Fattah, 2004: 27)

Secara ringkas, langkah selanjutnya setelah melakukan observasi data - data yang diperlukan penghitungan Biaya Satuan Pendidikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dokumen antara lain Rekapitulasi RAPBS tahun ajaran 2018/2019, daftar peserta didik tahun ajaran 2018/2019 dan profil TK Tunas Harapan Bangsa.
2. Mengklasifikasi biaya-biaya yang termasuk kelompok Biaya Operasional, kemudian menghitung Biaya Operasional per peserta didik dengan membagi antara total Biaya Operasional dengan jumlah peserta didik.
3. Mengklasifikasi biaya-biaya yang termasuk kelompok Biaya personal kemudian menghitung Biaya personal per peserta didik dengan membagi antara total Biaya personal dengan jumlah peserta didik.

4. Menghitung Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik dengan menggunakan rumus fungsi tersebut di atas

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain tentang objek. Teknik pengumpulan data atau file pembukuan yang telah ada yang diperoleh dari objek penelitian dan data yang penulis secara aktif terlihat secara langsung dan mendokumentasikan data – data yang berkorelasi dengan kebutuhan penulisan.

